

## **BPK Temukan Kerugian Negara**

### ● **Kontrak Kerja Sama Migas**

**JAKARTA** - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan setiap semester BPK menemukan kerugian negara pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas.

Kekurangan tersebut mencapai jutaan dolar Amerika Serikat yang sangat jauh dari suap yang diterima Rudi Rubiandini.

“Seperti pada semester kedua 2012, BPK menemukan kekurangan penerimaan negara pada 7 KKKS senilai 37,864 juta dolar AS dan Rp 6,33 miliar atau total Rp 372,48 miliar. Kemudian pada semester satu pada 3 KKKS berupa perhitungan bagi hasil senilai 51,47 juta dolar AS, ke mana uang itu?” kata Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas di Kantornya, Jl Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, kemarin

#### **Sektor Hulu**

Dia pun yakin Kernel Oil bukan satu-satunya KKKS dari SKK Migas. Menurut dia, terbukanya kasus ini barulah awalan pengungkapan tindak

korupsi di sektor migas. “Ini baru sektor hulu, belum lagi bicara eksplorasi, penyulingan, sampai ke hilir,” katanya.

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan supaya dibentuk UU Migas yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

SKK Migas itu satuan kerja *ad hoc* yang tugasnya selesai setelah undang-undang migas yang baru terbentuk. “Kalau sudah ketahuan menyimpang seharusnya UU Migas segera dibentuk,” ujarnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKK Migas berada di bawah Kementerian ESDM. Tentu muncul dugaan keterkaitan petinggi ESDM dengan kasus ini.

“Saya tidak mendesak Pak Jero untuk mundur, tapi kalau saya jadi Pak Jero saya akan bilang begini ke Pak SBY, ‘Pak Presiden, ternyata saya tidak sanggup menangani mafia minyak, saya lebih baik mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri ESDM’,” imbuhnya. (drc-71)